

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Pemerintah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 terbagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah, setiap daerah saat ini mempunyai wewenangnya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahnya sendiri. Salah satu dari bentuk wewenangnya adalah di setiap daerah di Indonesia mempunyai Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. APBD digunakan untuk menjadi dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan guna memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah (Kementerian Keuangan,2017). Berikut adalah 10 tertinggi realisasi pendapatan tahun 2017:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Tertinggi Se-Provinsi tahun 2017 (Triliun Rp)

No.	Nama Daerah	Jumlah
1.	Prov. Jawa Barat	116,99
2.	Prov. Jawa Timur	115,65
3.	Prov. Jawa Tengah	98,31
4.	Prov. DKI Jakarta	64,82
5.	Prov. Sumatera Utara	53,43
6.	Prov. Papua	49,26
7.	Prov. Aceh	44,80
8.	Prov. Sulawesi Selatan	35,80
9.	Prov. Sumatera Selatan	35,39
10.	Prov. Banten	32,59

Sumber: Kementerian Keuangan (2017)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan untuk 10 Provinsi di Indonesia dapat mencapai Rp647,04 Triliun. Dengan besarnya APBD yang dimiliki Indonesia sangat rawan diselewengkan oleh pejabat-pejabat dari masing-masing daerah. APBD yang sering menjadi objek korupsi menjadikan APBD tidak berjalan dengan optimal dan mengakibatkan menurunnya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di setiap daerah.

Sementara itu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sendiri menurut peneliti divisi investigasi Indonesia dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Wana Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang tahun 2017. Jumlah kerugian negarapun meningkat dengan angka sebesar Rp6,5 Triliun. Di Indonesia kasus korupsi yang terjadi sebagian besar di indikasikan terjadi pada pemerintahan daerah. Berikut adalah data kasus korupsi tahun 2017 berdasarkan provinsi (10 terbanyak):

Tabel 1.2 Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Provinsi (Miliar Rp)

No.	Tingkat	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian
1.	Pemerintah Pusat	34 Kasus	3,300
2.	Pemerintah Daerah:		
	a. Jawa Barat	42 Kasus	647
	b. Sulawesi Selatan	26 Kasus	390
	c. Sumatera Utara	40 Kasus	286
	d. Riau	25 Kasus	145
	e. Aceh	29 Kasus	133
	f. Kepulauan Riau	18 Kasus	126
	g. Jawa Timur	68 Kasus	90,2
	h. Jawa Tengah	29 Kasus	40,3
	i. Nusa Tenggara Barat	18 Kasus	6,7

Sumber: *Indonesia Corruption Watch 2017*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Jawa Barat menjadi salah satu Provinsi dengan nilai kerugian negara paling besar yaitu, Rp 647 miliar. Kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2017 adalah tertangkapnya Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap perizinan Meikarta. Iwa diduga menerima suap dari PT Lippo Cikarang terkait Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017 dan meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas (PUPR) Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili (Ramdhani,2017). Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi pada pemerintah daerah yang akan menyebabkan penurunan citra dan nilai pemerintah daerah di mata masyarakat.

Dalam upaya untuk memerangi korupsi, Indonesia dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). KPK adalah lembaga negara

yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Objek penelitian ini adalah instansi pemerintah daerah yang masuk dalam Survei Integritas Sektor Publik KPK pada tahun 2017, dikarenakan data tersebut sudah di publikasikan, sehingga data yang tersedia lengkap dan mudah untuk di akses. Selain itu, data yang dihimpun dianggap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah di publikasikan kepada publik.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Korupsi di Indonesia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tingkat korupsi di Indonesia pada saat ini dibandingkan dengan negara-negara lainnya yaitu Indonesia menempati peringkat 96 (dari 180 negara di dunia) dan menempati peringkat empat (dari 10 negara di Asia Tenggara) pada Indeks Persepsi Korupsi 2017. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37, masih sama seperti skor yang didapat Indonesia di tahun sebelumnya.

Semakin tinggi skor maka semakin bersih pula negara tersebut dari korupsi (KPK,2017). Berikut adalah tabel mengenai ringkasan survei Indeks Persepsi Korupsi 2017 di Asia Tenggara:

Tabel 1.3 Indeks Persepsi Korupsi 2017 di Asia Tenggara

No.	Negara	Peringkat	Skor
1.	Singapura	6	84
2.	Brunei Darussalam	32	62
3.	Malaysia	62	47
4.	Indonesia	96	37
5.	Thailand	96	37
6.	Vietnam	107	35
7.	Filipina	111	34
8.	Myanmar	130	30
9.	Laos	135	29
10.	Kamboja	161	21

Sumber: *Transparency International Indonesia 2017*

Untuk membantu mengatasi permasalahan korupsi yang ada di Indonesia, KPK melakukan survei integritas sektor publik yang dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Survei integritas sektor publik ini telah dilakukan sejak tahun 2007 secara berkala dan digunakan sebagai landasan perbaikan integritas dan antikorupsi di sektor layanan publik. Survei ini dilakukan dengan objek yang berbeda setiap tahunnya, namun 5 tahun belakang sampai 2017 untuk objek pemerintah daerah hanya dilakukan pada tahun 2013 dan 2017 saja. Telah terjadi beberapa fenomena pada tahun 2017, diantaranya sebagai berikut:

No.	Tahun	Sumber	Fenomena
1.	2017	Kompas (Gabrilin)	KPK menetapkan Bupati Subang, Ojang Sohandi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Subang. Ojang diduga berperan sebagai pemberi suap. Sementara dari sisi penerima suap, KPK menetapkan dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka. KPK menyita uang Rp528 juta, dari tersangka jaksa di Kejati Jabar. Salah satu jaksa yang ditangkap KPK, merupakan jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi BPJS Kabupaten Subang. Kasus korupsi BPJS Kabupaten Subang diduga merugikan negara sebesar Rp4,7 miliar
2.	2017	Kompas (Belaminus)	KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti sebagai tersangka Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, atas dugaan suap pada proyek peningkatan jalan TES-Muara Aman dan proyek peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong. Dalam kasus ini, Ridwan diduga mendapat commitment fee Rp 4,7 miliar dari proyek itu. Suap untuk Ridwan diberikan oleh Jhoni.

Dengan adanya fenomena seperti diatas, maka KPK saat ini berupaya untuk lebih aktif dalam melakukan upaya memerangi korupsi dengan dibantu oleh BPK. Ada beberapa kriteria yang mempengaruhi BPK dalam memberikan opini pada laporan keuangan. Selama pelaksanaan proses audit tersebut, auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi yang membutuhkan tindakan perbaikan. Penyimpangan-

penyimpangan dari norma-norma atau kriteria yang dapat diterima disebut temuan audit.

Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas (Halim, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Rini & Damiati (2017) yang menyatakan bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi akan tetap terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Masyitoh et al. (2015) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap persepsi korupsi pemerintah daerah, menurut penelitian tersebut pemerintah daerah yang memperoleh pernyataan tidak memberikan pendapat dari auditor memiliki persepsi korupsi yang secara signifikan lebih tinggi dibanding pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang disusun oleh BPK temuan audit berupa temuan atas pengendalian intern, temuan atas ketaatan terhadap peraturan perundangan dan temuan kecurangan dan ketidakpatuhan, selanjutnya harus disajikan menurut elemen temuan yang terdiri dari kriteria, kondisi, sebab dan akibat. Berdasarkan penelitian dari Huefner (2011) menyatakan bahwa temuan audit sistem pengendalian internal dapat digunakan untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan pemerintah daerah, sama halnya dengan penelitian oleh Liu dan Lin (2012) yang menyatakan bahwa tingkat korupsi di Provinsi China dipengaruhi oleh temuan audit. Tetapi, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Masyitoh et al. (2015) membuktikan bahwa temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi di pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah opini audit dan temuan audit berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap tingkat korupsi yang terjadi di Pemerintah Daerah di Indonesia. Oleh karena itu

peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2017)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang jauh dari tindak pidana korupsi diperlukan adanya upaya pemberantasan korupsi, dimulai dari upaya pencegahan seperti penanaman semangat nasional, melakukan penerimaan pejabat tinggi maupun pegawainya secara jujur dan terbuka, serta menghimbau kepada masyarakat hingga pada elite pemerintahan untuk melakukan pencatatan ulang aset dan dilaporkan kepada pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset juga dapat menjadi upaya pencegahan tindakan korupsi. Tetapi hal tersebut akan tetap memicu adanya tindak pidana korupsi karena tidak adanya efek jera yang diberikan. Untuk memberikan efek jera pemerintah wajib melakukan penindakan melalui KPK, dan secara tidak langsung memberikan *shock therapy* pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia KPK dibantu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerjasama tersebut dilakukan ketika KPK menemukan kasus korupsi yang awalnya berasal dari laporan audit keuangan yang dilakukan BPK. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan opini audit dan temuan audit yang dihasilkan BPK dapat mengurangi peluang-peluang pemerintah daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Saat ini pada faktanya Indonesia tetap termasuk negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang cukup sering, dilihat dari data-data yang telah ditemukan oleh penulis, tingkat korupsi di Indonesia tidak terlihat menurun dari tahun sebelumnya. Opini audit dan temuan audit yang diharapkan dapat membantu KPK ternyata masih belum efektif karena masih ditemukan adanya beberapa kasus di Indonesia, seperti opini WTP atas Laporan Keuangan di daerahnya tetapi tetap terbukti melakukan korupsi yang merugikan negara. Karena masih ditemukan adanya

kasus tersebut, diperlukan adanya pengujian kembali mengenai pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini akan dilihat apakah pengaruh opini audit dan temuan audit berpengaruh baik secara simultan dan parsial terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana opini audit, temuan audit dan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017?
2. Apakah terdapat pengaruh opini audit dan temuan audit secara simultan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Opini audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017?
 - b. Temuan audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibuat, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui opini audit, temuan audit dan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017
2. Untuk menginvestigasi pengaruh opini audit dan temuan audit secara simultan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017.
3. Untuk menginvestigasi pengaruh secara parsial dari:

- a. Opini audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017.
- b. Temuan audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi di Pemerintah Daerah yang disurvei KPK pada Tahun 2017.

2) Bagi Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi variabel yang berkaitan dengan opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi di Pemerintah daerah yang disurvei KPK pada tahun 2017.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur akuntansi, terutama yang berhubungan dengan opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi di Pemerintah daerah yang disurvei KPK pada tahun 2017.

1.6.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kementerian dan pemerintah daerah di Indonesia dalam memberantas korupsi.

1.7 Ruang Lingkup Objek Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihimpun dari ikhtisar hasil pemeriksaan tahun 2017 dari BPK dan survei penilaian integritas tahun 2017 oleh KPK. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintah Daerah

yaitu pemerintah kota dan kabupaten yang masuk dalam Survei Integritas Sektor Publik KPK pada tahun 2017.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dengan melakukan pengolahan data terhadap hasil pemeriksaan BPK dan survei yang dilakukan oleh KPK pada Instansi Pemerintah Daerah yaitu pemerintah kota dan kabupaten yang masuk dalam Survei Integritas Sektor Publik KPK pada tahun 2017.

1.7.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah opini audit dan temuan audit. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi yang ada di Instansi Pemerintah Daerah yaitu pemerintah kota dan kabupaten pada tahun 2017.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi peneliti. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan

masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III – METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), uji validitas dan analisis data.

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.